

PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN SEIRING DENGAN PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI

Abuddin Nata

This article is an exploration on socio-economic changes as the result of the advancement in science and technology in the era of globalization and their impact on the reformation of educational system of the pesantren. This article also tries to elicit ideas and concepts for the development of educational models for pesantren in the future as well as concepts and steps for the revitalization of education in pesantren in the era of globalization. The article starts with brief accounts of socio-economic changes, followed by description of the problems faced by pesantren in education, and ends with bringing up ideas and thoughts relating to the changes in the educational system of the pesantren.

A. Pengantar

Kajian terhadap topik ini sangat menarik dan penting dilakukan, karena beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, topik ini mengisyaratkan adanya keprihatinan dan tanggung jawab yang mendalam dari Departemen Agama terhadap masa depan eksistensi dan peran pendidikan pesantren dalam per-

caturan global yang makin kompetitif dan bahkan kejam adanya. Dalam situasi yang demikian itu, Departemen Agama sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam mengawal perjalanan pendidikan pesantren perlu melakukan langkah-langkah yang *strategis* dan *urgent* bagi pertumbuhan dan perkembangan pesantren di masa depan yang penuh tantangan itu.

Selain itu, kajian terhadap masalah ini diharapkan dapat menyadarkan kalangan para pengelola pendidikan pesantren untuk memberikan responsi yang tepat dengan perubahan yang terjadi, sehingga pendidikan pesantren benar benar dapat berjalan pada “*on the right track*” atau “*on the ideal track*”.¹

Kedua, terdapat sebuah kecenderungan yang kuat bahwa untuk menilai apakah sebuah pesantren berada dalam *on the right track* atau *on the ideal track* adalah amat bergantung pada keadaan pesantren dalam menjawab tantangan aktual yang dihadapinya. Di masa lalu, pesantren demikian dihormati dan disegani oleh masyarakat, oleh karena peran yang dimainkannya saat itu benar benar telah memenuhi harapan masyarakat. Peranan pesantren di masa lampau terlalu

banyak untuk diceritakan atau dibahas segi segi positifnya. Pesantren telah lahir pada zamannya yang tepat. Pada saat ini, pesantren selain berperan sebagai lembaga *tafaqquh fi al ddin* yang menghasilkan ulama-ulama ahli agama yang handal, mendalam dan luas serta sebagai pengawal moral umat, juga telah berhasil dalam menghadapi penetrasi asing kolonial, baik dalam bidang politik dan terlebih lebih dalam bidang sosial budaya. Di tengah-tengah dunia yang masih “sempit” informasi, pesantren melalui figur kiainya yang kharismatik, sebagaimana dikatakan Clifford Greetz telah mencatat sebagai *Cultural Broker*. Hal ini terjadi, karena merekalah (dunia pesantren) yang menerima informasi dari pusat dunia waktu itu dan menyampaikannya kepada para

¹ Responsi pesantren dalam menjawab tantangan global dalam hubungannya dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya amat beragam. *Pertama*, yang merupakan bagian terbesar, yaitu kelompok pesantren yang tidak menyadari dirinya, apakah bernilai baik atau bernilai kurang baik. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi adalah terjadi begitu saja, tanpa ada persoalan serius yang perlu mereka pikirkan. *Kedua*, adalah kelompok yang seperti seorang zealot atau fanatik yang karena kefanatikannya ini membuat penilaian mereka kurang obyektif. Kelompok ini menilai bahwa pesantren dengan segala aspeknya adalah positif dan mutlak harus dipertahankan. *Ketiga* adalah, kelompok yang kehinggaan perasaan rendah diri. Perasaan ini bisa menumbuhkan sikap pesimis dan kurang percaya diri dalam “mengejar” ketertinggalannya, sehingga mereka menganggap identitas pesantrennya tidak perlu lagi dipertahankan. Tentunya ini akan mengakibatkan rusaknya identitas pesantren secara keseluruhan. *Keempat*, mungkin kelompok ini yang paling sedikit jumlahnya, yaitu pesantren pesantren yang sepenuhnya menyadari dirinya sendiri baik segi segi positif maupun negatifnya, sanggup dengan jernih melihat mana yang harus diteruskan dan mana yang harus ditinggalkan. Kelebihan mereka dalam melakukan introspeksi secara obyektif ini menjadikannya memiliki kemampuan beradaptasi secara positif pada perkembangan zaman dan masyarakat. Lihat Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), cet. 1, hal. 104-105

santri serta masyarakat dalam pembelaan dan pemberdayaan masyarakatnya.² Peran pesantren yang demikian itu di masa sekarang mungkin sebagian masih bisa dilakukan, namun di masa sekarang dan mendatang yang terpenting adalah menjawab tantangan zaman di era global. Dalam menghadapi dua tarikan ini, memposisikan pesantren berada di persimpangan jalan. Yaitu persimpangan antara meneruskan peranan yang telah diembannya selama ini atau menempuh jalan menyesuaikan diri sama sekali dengan keadaan. Yang dimaksud dengan menyesuaikan diri dengan keadaan itu adalah keikutsertaan sepenuhnya dalam arus pengembangan ilmu pengetahuan (modern), termasuk di dalamnya bagian yang merupakan ciri utama kehidupan abad ini, yaitu teknologi.

Ketiga, era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan dampak yang amat luas terhadap kehidupan umat manusia. Berbagai pranata kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kehidupan

beragama, pola komunikasi, pertahanan keamanan dan lain sebagainya mengalami perubahan. Berbagai perubahan tersebut pada akhirnya memaksa dunia pesantren untuk melakukan penyesuaian diri di sana sini, jika pesantren tersebut ingin tetap eksis dan diminati masyarakat di era modern tersebut. Khusus dalam perubahan yang terjadi dalam bidang sosial ekonomi di era global ini menuntut adanya pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan pesantren di Indonesia mencatat, bahwa di kalangan para alumni pesantren terdapat slogan yaitu tidak mau menjadi pegawai negeri. Dengan sikap zuhud atau tidak materialistisnya, atau sikap kesederhaannya, membuat para alumni pendidikan pesantren mencari jalan hidup dengan berwiraswasta. Kiai umumnya hidup dengan usaha bisnis atau pertanian dan tidak tergantung pada gaji atau upah dari orang lain. Basis ekonomi inilah yang menjadikan mereka mandiri dan memiliki integritas serta berani memberikan koreksi atau kritik terhadap penyelewengan dan kesewenang-

² Kasus kasus penting yang dapat diketengahkan dalam konteks ini adalah peranan mereka dalam Protes Movement in Rural Java pada abad X IX, Pemberontakan Petani di Cilegon Banten pada masa lalu, dan peranan mereka dalam Kasus Nipah di Madura, dan Kasus Jenggawah di Jember. Lihat Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), cet. 1, hal. 45; Lihat pula Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, op. cit., hal. 105

wenangan. Namun slogan para alumni pesantren untuk tidak mau jadi pegawai negeri atau mendapatkan kedudukan yang strategis pada berbagai sektor kegiatan kembali dipertanyakan. Menurut Cak Nur, agaknya slogan tersebut merupakan sisa sikap isolatif dan non kooperatif zaman kolonial dulu. Tetapi sekarang, demikian Cak Nur mengatakan, perlu diperiksa kembali, apakah sikap itu hasil perenungan yang sadar ataukah sekedar seperti kata, pepatah; “anggunnya masam” saja. Maksudnya adalah tidak mau menjadi pegawai negeri sebab mereka memang tidak memenuhi syarat untuk jadi pegawai negeri. Ini terbukti ketika dibuka kesempatan menjadi pegawai negeri, seperti ujian guru agama, para alumni pesantren berebut melamar pekerjaan tersebut.³ Ironisnya, pintu kepegawaian itu hanya ada pada Departemen Agama saja, sehingga pesantren yang semula berkeinginan mendidik orang-orang yang paling *independent*,

pada hakikatnya justru menghasilkan lulusan yang tergantung hanya pada satu departemen saja.

Selain itu, sikap non materialistik dalam pesantren tersebut masih harus dipertanyakan dengan sungguh-sungguh sampai di mana kesejatiannya. *Non materialisme*, dan zuhud agaknya terjadi di pesantren sebagai akibat tak langsung dari kondisi sosial masyarakat secara umum. Apakah suasana umum yang meliputi pesantren itu hanya merupakan refleksi keadaan sosial ekonomis masyarakat yang diwakilinya saja (yaitu masyarakat pedesaan), meskipun ada yang kaya tapi masih bersifat agraris dan kurang terpelajar, ataukah betul-betul merupakan perwujudan dari konsep yang sadar penuh niat?

Meskipun kita berharap pesantren dapat berperan banyak melalui semangat non materialistik ini, namun bila kita lihat dalam pesantren sendiri, semangat ini kurang mendapat tekanan dalam kurikulumnya. Demikian pula ajaran

³ Pada awal tahun 70 an di masa Pemerintahan Orde Baru terdapat permintaan yang tinggi terhadap guru agama. Permintaan ini timbul sebagai akibat lebih jauh dari upaya memperkuat ketahanan mental keagamaan masyarakat melalui jalur pendidikan, yang di masa Orde Lama upaya tersebut cenderung diabaikan, sehingga Partai Komunis Indonesia (PKI) lebih leluasa bergerak. Melalui Proyek Ujian Guru Agama (UGA) para alumni pondok pesantren dengan modal ilmu agama yang baru pada tingkat dasar, dangkal dan tradisional, serta tidak memiliki bekal keterampilan mengajar (*teaching skill*) sama sekali terpaksa diangkat jadi guru. Keadaan ini juga telah membuka terjadi praktek KKN dalam pengangkatan Guru Agama tersebut, dan telah menyeret pelakunya masuk penjara. Sebuah tindakan darurat ini, secara profesional sungguh tidak bertanggung jawab, karena telah menyerahkan dunia pendidikan yang bertugas menyiapkan nasib masa depan bangsa kepada orang-orang yang tidak profesional.

hidup mandiri dengan mengembangkan sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*) juga kurang diberikan. Pengajaran di pesantren banyak didominasi oleh kajian fikih ubudiyah, teologi jabariah (*fatalisme*), dan tasawuf yang cenderung kurang mendorong timbulnya etos kerja dan kemandirian.

B. Perubahan Sosial Ekonomi

Pada saat pesantren mulai didirikan situasi sosial ekonomi ditandai oleh sistem sosial ekonomi yang berbasis pada masyarakat agrigultural, dengan menempatkan sektor pertanian dan perdagangan yang bersifat tradisional sebagai basis andalannya, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam, berorientasi pada keberkahan, tidak menggunakan teknologi modern, berorientasi ke belakang, kurang efisien, dan menekankan pada pola hubungan yang bersifat komunal.

Sistem perekonomian masyarakat agraris yang demikian itu dibiarkan berjalan secara alami, tanpa adanya sentuhan pembaha-

ruan dari para lulusan pesantren. Hal ini sejalan pula dengan pengajaran yang terjadi di Pondok Pesantren yang menekankan aspek fiqh ubudiyah, dan kurang sekali menekankan aspek fiqh muamalah yang di dalamnya justeru memiliki dasar-dasar ekonomi syari'ah yang masih dapat diterapkan di masa sekarang. Dalam hubungan ini KH. Anwar Ibrahim misalnya mengatakan bahwa ketika itu fiqh muamalah sebatas di madrasah dan masjid saja. Dalam praktik sehari-hari justeru amat jauh. Akhirnya pengetahuan masyarakat tentang muamalah sangat dangkal. Ulama terdahulu menurutnya telah menjelaskan pedoman yang bisa digunakan mulai bab jual beli (*Kitab al Buyu*), tentang jaminan (*rahn*), alih utang (*hawalah*), perkongsian (*syirkah*), perwakilan (*wakalah*), penitipan (*wadiah*), sewa (*jarah*), bagi hasil (*mudharabah*), wakaf, hibah, pengurusan kebun dan lainnya.⁴ Ajaran fiqh muamalah yang demikian itu, walaupun dikaji, hanya sebatas wacana dan tidak berlanjut pada praktek. Kini umat Islam termasuk baik yang sudah tamat dari Pondok Pesantren atau masih sedang belajar di pesantren dihadapkan kepada berbagai tantangan baru

⁴ Lihat KH. Anwar Ibrahim (Dosen Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), *Ekonomi Syariah Gerbang Kebangkitan Dunia Islam*, dalam *Harian Umum Republika*, Sabtu, 9 Juli 2005, hal. 15.

dalam bidang sosial ekonomi. Dalam hubungan ini, ada berbagai pandangan mengenai corak kehidupan abad yang akan datang, sebagai berikut. *Pertama*, menurut Daniel Bell, sebagaimana dikutip Mochtar Buchori bahwa kehidupan dalam masa mendatang akan ditandai oleh dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi, dan kecenderungan untuk berpecah belah (*fragmentasi*) dalam kehidupan politik.

Kedua, bahwa globalisasi akan mewarnai seluruh kehidupan di masa mendatang. Salah satu arti globalisasi ialah bahwa masalah-masalah tertentu seperti masalah pertumbuhan penduduk, masalah lingkungan, masalah kelaparan, masalah narkoba, masalah-masalah hak-hak asasi manusia, dipandang sebagai persoalan-persoalan yang bersifat global, persoalan-persoalan yang menyangkut nasib seluruh umat manusia. Masalah tersebut harus direspon oleh umat Islam bersama dengan komponen masyarakat lainnya.

Ketiga, bahwa kemajuan sains dan teknologi yang terus melaju dengan cepat, akan mengubah secara radikal situasi pasar tenaga kerja.

Kemajuan teknologi menyebabkan pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak diperlukan lagi, dan timbullah pekerja-pekerja baru yang menuntut kecakapan baru. Akibat dari keadaan ini, maka pendidikan ulang (*re education*) atau pelatihan ulang (*re training*) menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan produktifitas dan untuk mengurangi pengangguran.

Keempat, bahwa proses industrialisasi dalam ekonomi dunia makin menuju pada penggunaan teknologi tingkat tinggi. Dan *Kelima*, bahwa di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari globalisasi informasi ini, akan lahir suatu gaya hidup baru yang mengandung ekses-ekses tertentu. Saat ini sudah tampak beberapa gejala yang dapat dipandang sebagai ekses dari gaya hidup yang dilahirkan oleh zaman globalisasi ini. Penyebaran informasi yang sangat cepat tentang obat-obatan yang mengandung narkoba, literatur pornografi, penggunaan senjata api, serta alat-alat mikro elektronika untuk melakukan tindakan kejahatan; informasi informasi seperti ini telah mendorong banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.⁵

⁵ Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatoris*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2001), cet. I., hal.27-32

Selain itu terdapat pula hal lain yang lebih dahsyat pengaruhnya terhadap perubahan sosial ekonomi sebagaimana tersebut di atas, yaitu adanya era perdagangan bebas sebagaimana terlihat pada kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam organisasi perdagangan dunia atau *WTO (World Trade Organization)*.⁶ Selanjutnya pada akhir tahun 2005 ini, negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut (termasuk Indonesia) akan menandatangani *GATS (General Agreement on Trade in Service)* yang mengatur liberalisasi perdagangan sebanyak 12 sektor jasa, yang di antaranya jasa layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, dan pendidikan tinggi.

Pada saat ini sudah tercatat 144 negara yang telah menyetujui *GATS*. Negara-negara tersebut harus mematuhi komitmen-komitmen khusus mengenai *market acces* dan *national treatment* untuk sektor jasa tertentu. Negara-negara yang tidak mau menyetujui *GAT* akan berhadapan dengan resiko berupa tertutupnya akses atas kemudahan untuk memasarkan atau memper-

dagangkan jasa-jasa yang dimilikinya. Timbulnya kebijakan liberalisasi dalam perdagangan pada sektor jasa pendidikan tersebut erat kaitannya dengan era globalisasi. Alasannya cukup masuk akal, yaitu karena liberalisasi sebagaimana tersebut di atas, adalah liberalisasi yang bersifat global, bukan liberalisasi lokal, nasional, atau regional, melainkan bersifat global.

Menghadapi liberalisasi sektor pendidikan sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup mendalam. Mereka yang khawatir terhadap *GATS*, mengatakan bahwa *GATS* akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan publik, terutama pendidikan. Liberalisasi pendidikan ini telah menimbulkan pro dan kontra.

Para pendukung dimasukkan nya jasa pendidikan terhadap skema *GATS* memiliki argumentasi yang secara ekonomi cukup meyakinkan. Mereka misalnya mengatakan, bahwa pelaksanaan jasa pendidikan pada hakikatnya merupakan perdagangan jasa lain, sehingga perlu dilakukan liberalisasi pula. Mereka juga berpendapat bahwa kebijakan

⁶ Sejak tahun 1995, Indonesia telah menjadi anggota *WTO* dengan diratifikasinya semua perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No. 7 Tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata perdagangan barang, jasa dan *trade related intellectual property right (TRIPS)* atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa yang termasuk sebagai obyek pengaturan *WTO* adalah semua jasa, kecuali jasa non komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya.

liberalisasi pendidikan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota, termasuk negara-negara yang sedang berkembang. Sementara itu para penentang liberalisasi pendidikan juga memiliki argumentasi yang sama kuat. Mereka misalnya mengatakan, bahwa jasa pendidikan bukan termasuk komoditas perdagangan untuk tujuan komersial. Pendidikan adalah jasa layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan bagi rakyat. Upaya yang harus dilakukan ini adalah bukan dengan cara bersaing secara tidak sehat dan saling mematikan, namun sebuah kegiatan yang berpedoman pada prinsip saling membantu dan bersinergi atas dasar saling memajukan dan menguntungkan bagi rakyat negara masing-masing.

Namun terlepas dari pro kontra sebagaimana tersebut di atas, lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan bentuk dan jenis pendidikan lainnya, termasuk pendidikan pesantren, harus menghadapi era pasar bebas (*free market era*) dalam bidang pendidikan dan jasa-jasa lainnya. Hal ini dikatakan, karena Indonesia sudah masuk sebagai salah satu negara anggota

WTO sebagaimana tersebut di atas. Kenyataan ini juga diperlihatkan oleh adanya sejumlah pasal dan ayat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi isyarat adanya persetujuan terhadap adanya perdagangan bebas dalam bidang pendidikan. Pada pasal 65 ayat I Undang-undang Sisdiknas tersebut misalnya dikatakan bahwa lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama juga dikatakan bahwa kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Beberapa contoh dampak era globalisasi tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya perubahan dalam sistem sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan terjadinya perubahan orientasi pendidikan. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat modern adalah tenaga kerja yang menguasai teknologi modern, mampu mengakses berbagai sumber informasi yang berdampak

⁷ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta:Depdiknas, 2003), hal. 87.

ekonomi, memahami berbagai bidang produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat modern, serta kemampuan menjual berbagai produk tersebut dengan memanfaatkan berbagai assosiasi perdagangan tingkat dunia. Berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang sosio ekonomi tersebut telah diketahui oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan modern yang sebagian besar tinggal di perkotaan. Mereka itulah yang akan mampu memanfaatkan berbagai peluang tersebut. Keadaan ini pada gilirannya merubah pandangan masyarakat untuk menyiapkan putera puterinya melalui lembaga pendidikan yang dapat memberikan bekal yang cukup untuk merebut berbagai peluang kerja. Lembaga pendidikan yang menurut masyarakat tidak menjadikan harapan yang demikian, dengan sendirinya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu tidak mengherankan jika berbagai program studi yang ditawarkan berbagai Perguruan Tinggi yang tidak menawarkan prospek meraih ekonomi yang menjanjikan itu akan ditinggalkan oleh masyarakat.

C. Respon Dunia Pesantren terhadap Perubahan Sosial Ekonomi

Berbagai perkembangan yang terkait dengan terjadinya perubahan pada sosio ekonomi masyarakat yang demikian itu telah direspon oleh kalangan dunia pesantren dengan cara yang amat beragam. Dunia pesantren telah memberikan respon yang beragam terhadap tantangan tersebut. Di antara respon yang paling menonjol adalah dengan cara memasukkannya berbagai program pendidikan umum dan keterampilan di samping program pendidikan keagamaan yang sudah ada sebelumnya.

Bentuk-bentuk pendidikan di pesantren kini sangat bervariasi yang dapat diklasifikasikan sedikitnya menjadi lima tipe, yakni (1) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA dan PT Agama Islam) maupun yang juga memiliki sekolah umum (SD, SLTP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi Umum) seperti Pesantren Tebuireng, Jombang, Pesantren Futuhiyah Mranggen Demak dan Pesantren Asy-Syafi'iyah, Jakarta; (2) Pesantren yang menyelenggarakan

pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo, Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati (Mathali'ul Falah), dan Pesantren Darur Rahman, Jakarta; (3) Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah, seperti Pesantren Salafiyah Langitan Tuban, Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tegalrejo, Magelang; (4) Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian (majelis ta'lim) yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, sebagaimana terdapat dalam Kitab Kuning; (5) Pesantren yang terdapat pada sekolah-sekolah Umum atau Perguruan Tinggi yang diperuntukkan bagi pelajar sekolah umum dan mahasiswa, seperti Pesantren yang terdapat pada Universitas Islam Malang; Pesantren (Asrama) yang terdapat pada Sekolah SMU Madania, Parung, Bogor dan sebagainya.⁸

Perkembangan bentuk bentuk program pendidikan yang terdapat di Pesantren sebagaimana tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas, bahwa sesungguhnya Pesantren memiliki kepekaan dan daya antisipatif

yang tinggi dalam merespon berbagai perkembangan yang terjadi. Pesantren tampak tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan momentum yang ada, sebagaimana yang pernah ia perankan pada momentum di masa lalu. Harus diakui bahwa pesantren dengan berbagai program yang terdapat di dalamnya telah memiliki andil yang besar dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia, baik pada masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Ia memiliki peran multidimensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang ideologi, sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan dalam bidang medis, hukum dan lain sebagainya.

Semangat dunia pesantren dalam merespon dan memanfaatkan momentum sebagaimana dilakukannya pada masa lalu, masih perlu dilanjutkan dengan melakukan berbagai upaya pembaharuan sesuai dengan tantangan zaman. Respon dunia pesantren terhadap berbagai tantangan di era global sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan agar peran dan fungsi pesantren tetap eksis dalam mengawal perjalanan bangsa, dan sekaligus memberi peluang yang sebesar-besarnya bagi para lulusannya agar dapat meng-

⁸ H. Ahmad Qodri Abdullah Azizy, M.A., Ph.D., "Memberdayakan Pesantren dan Madrasah" dalam Ismail SM, dkk., (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar, 2002), cet. 1, hal. viii ix

ambil peran dalam percaturan dunia dewasa ini. Jika dunia pesantren tidak mampu memberi responsi yang tepat maka pesantren akan kehilangan relevansinya dan akar-akarnya dalam masyarakat akan tercabut dengan sendirinya, dengan segala kerugian yang bakal ditanggung.⁹ Untuk melakukan hal yang demikian itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, perlu mengatasi/menghilangkan berbagai kelemahan yang selama ini masih terdapat di kalangan pendidikan pesantren pada umumnya. Kajian terhadap berbagai kelemahan yang terdapat di kalangan pendidikan pesantren ini telah banyak dilakukan para ahli. Nurcholis Madjid misalnya dengan agak lengkap telah mengungkapkan berbagai kelemahan yang dimiliki dunia pesantren pada umumnya. Berbagai kelemahan tersebut meliputi kelemahan kondisi lingkungan, penghuni/santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni dan tidak materialistis. Lingkungan pesantren merupakan hasil pertumbuhan tak berencana; sekalipun menggambarkan pola budaya yang diwakilinya. Letak masjid, asrama atau pondok, madrasah, kamar mandi, kakus

(WC) umum, perumahan pimpinan, dan lain lain umumnya sporadis; kamar kamar asramanya sempit dan minim peralatan, jumlah kamar mandi yang terbatas, halaman yang tidak teratur, becek di musim hujan, gersang dan berdebu di musim kemarau, dan kadang kadang sampah berserakan di sana-sini. Sehubungan dengan itu penyakit dengan mudah menghinggapi para santri, khususnya penyakit kudisan, di samping penyakit yang bersifat psikologis seperti penyakit rendah diri dalam pergaulan, ketika mereka harus bergaul dengan masyarakat di luar mereka. Mungkin ini yang menyebabkan adanya tingkah laku yang kurang konsisten pada para santri. Untuk lingkungan intern mereka sangat "*liberal*". Ini ditunjukkan dengan tingkah laku termasuk pembicaraan mereka yang hampir-hampir seenaknya. Tetapi, ketika mereka berhadapan dengan orang luar, sikap ini tidak tampak. Bisa dikatakan mereka kurang "*gallant*". Apalagi jika mereka berhadapan dengan orang lain yang berbeda agama, ras, pandangan politik, faham keagamaan intern, atau malah sekedar dari pesantren lain.

⁹ Sungguh ironis, bahwa yang lebih dahulu menyadari bahwa pesantren sedang kehilangan relevansi sosialnya adalah para tokoh pesantren sendiri yang kemudian seolah-olah jera mengirimkan anak-anaknya ke pesantren. Lihat Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: op. cit*, hal. 100

Selanjutnya pada aspek para penghuni pesantren atau yang lebih dikenal sebagai santri ditandai oleh pakaian yang dikenal dengan istilah sarungan, walaupun hal ini tidak berarti sarung itu jelek. Namun hal yang berkaitan dengan pakaian santri berkenaan dengan cara memakainya yang tidak membedakan antara pakaian untuk belajar, untuk tidur, untuk belajar, untuk bepergian dan sebagainya.

Demikian pula pada aspek kurikulum, kekurangan atau kelemahan terlihat pada dominannya mata pelajaran agama yang bertumpu pada *fiqih, aqa'id, tasawuf, tafsir* dan *hadis*. Selanjutnya pelajaran *Nahu Sharaf* juga menempati kedudukan penting sekali, sehingga menuntut waktu dan tenaga yang sangat banyak, khususnya untuk menghafal kaidah kaidah teoritis tentang *syair syair awamil, Imrithi, dan Alfiyah*, tanpa dibarengi dengan praktek menulis dan berbicara dalam bahasa Arab. Karena begitu kuatnya pelajaran *Nahu Sharaf* ini, timbul keanehan, yaitu mereka menganggap pelajaran gramatika bahasa Arab tersebut sebagai ilmu agama. Pada sebagian pesantren saat ini ada juga yang mengajarkan pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan setengah-setengah, sekedar memenuhi syarat agar tidak dinamakan kolot saja, sehingga kemampuan para santri dalam

bidang pengetahuan umum inipun biasanya sangat terbatas dan kurang mendapat pengakuan masyarakat umum.

Demikian pula dalam sistem pengajaran mata pelajaran dalam kurikulum itupun dilakukan dengan cara yang kurang efisien. Ini disebabkan caranya yang unik dan memang khas pesantren. Sistem penjenjangan (*graduation*) yang tidak sistematis (sering terjadi pengulangan), pemilihan kitab yang kurang relevan, cara membaca kita secara harfiah (kata demi kata) dan seterusnya. Keadaan tersebut menghasilkan para santri yang memiliki pengetahuan yang serba *verbalisme*, tanpa diikuti dengan kemampuan penalaran. Berbagai unsur penalaran yang sesungguhnya terdapat dalam pelajaran *fiqih, aqa'id, dan nahu sharaf* sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil mereka kembangkan. Keadaan ini menghasilkan para santri yang mampu menghafal dan mereproduksi pengetahuan, namun tidak mampu melakukan penalaran secara kreatif. Keadaan para santri yang demikian itu jika masuk Perguruan Tinggi, mereka akan lancar pada tahun-tahun pertama, karena masih banyaknya hafalan yang mereka miliki, namun pada tahun-tahun akhir ketika mereka dituntut harus menganalisa, menulis dan memproduksi penalarannya mulai keteter.

Kelemahan berikutnya terlihat pada kepemimpinan di pesantren yang menganut pola kepemimpinan kharismatik yang sesungguhnya tidak mengandung unsur demokratis, sebab tidak rasional. Karena kepemimpinan kiai yang kharismatik itulah, maka dengan sendirinya juga bersifat pribadi atau personal. Kenyataan ini mengandung implikasi bahwa seorang kiai tidak mungkin digantikan oleh orang lain serta sulit ditundukkan di bawah “*rule of the game*”. Seorang kiai selain menjadi pemimpin agama, juga sekaligus merupakan “*traditional mobility*” dalam masyarakat feodal. Dan feodalisme yang berbungkus keagamaan ini bila disalahgunakan jauh lebih berbahaya daripada feodalisme biasa. Kiai lebih mampu mengerahkan masa daripada pemimpin feodal biasa, apalagi banyak kiai yang sekaligus juga membanggakan dirinya sebagai bangsawan. Seorang kiai memiliki “*inertia*” terhadap gejala-gejala perubahan sosial. Ini disebabkan oleh kecenderungan bawah sadar untuk tetap mempertahankan kedudukannya yang menguntungkan itu.

Selanjutnya kelemahan pada pesantren terlihat pula pada alumninya. Pesantren melalui wakil-

wakilnya yang cukup *articulate*, biasanya membanggakan diri sebagai lembaga pendidikan yang mampu menciptakan kader-kader dan pimpinan-pimpinan masyarakat. Tetapi kalau diperhatikan, ternyata para alumninya hanya cocok terutama untuk jenis masyarakat yang memang sudah dari semula menerima dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di pesantren yang bersangkutan. Sedangkan untuk masyarakat umum, mereka sama sekali tidak memenuhi harapan. Buktinya kita kesulitan menemukan tenaga-tenaga yang memadai untuk mengajar agama di sekolah-sekolah umum sekalipun jumlah lulusan pesantren sangat banyak. Apalagi untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di perguruan perguruan tinggi. Alumni-alumni pesantren seperti ini hanya cocok untuk mengajar di lembaga lembaga pendidikan yang sejenis dengan pesantren sendiri, seperti madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan sekolah keagamaan lainnya.¹⁰

Mengingat adanya berbagai kelemahan pada pesantren sebagaimana tersebut di atas, maka selama zaman kolonial, pesantren lepas dari perencanaan pendidikan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda berpendapat bahwa sistem pen-

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, op. cit., hal. 90-99

didikan Islam yang terdapat di Pesantren saat itu sangat jelek baik ditinjau dari segi tujuan, maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial Belanda. Tujuan pendidikannya dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya.¹¹

Uraian tersebut di atas, memperlihatkan dengan jelas, bahwa pendidikan pesantren masih banyak mengandung kelemahan dan ketidaksesuaian dengan tuntutan zaman. Keadaan pesantren yang demikian itu tidak lagi menarik bagi masyarakat modern yang menghendaki putera-puterinya dapat melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Umum yang bergengsi. Lulusan dari pendidikan pesantren yang demikian itu dianggap tidak akan mampu mengisi lapangan kerja yang berorientasi pada kegiatan ekonomi modern, industrialisasi,

jasa pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan lain sebagainya.

Terjadinya disorientasi, yakni pesantren kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang sekarang ini terjadi perubahan yang demikian cepat. Dalam konteks perubahan ini, pesantren mengalami dilema antara keharusan mempertahankan jati dirinya dengan kebutuhan menyerap budaya baru yang datang dari luar pesantren.

Menyadari tantangan sosial ekonomi masyarakat yang demikian itu, maka telah banyak lembaga pesantren yang berupaya memperbaharui sistem pendidikannya. Berbagai kelemahan yang terdapat di pesantren mulai dari lingkungan, kurikulum, metode pembelajaran, manajemen, program pengajaran, tenaga guru, sarana dan prasarana lainnya sudah mulai diatasi, dan dipermodern, walaupun jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan pesantren yang memiliki berbagai kelemahan sebagaimana tersebut di atas.¹²

¹¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), cet. hat. 22

¹² Saat ini terdapat sejumlah pesantren yang tergolong modern, dilihat dari lulusannya yang dapat melanjutkan studinya ke berbagai Perguruan Tinggi Umum Negeri yang tergolong berat seperti ITB, UI, UGM, 1PB, UIN, dan lainnya, dan setelah tutus menjadi sarana banyak di antara mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan swasta dengan kedudukan yang strategis dan menentukan, menjadi anggota DPR, Menteri, Duta Besar, Diplomat, Pengacara, Hakim dan sebagainya. Di antara pesantren yang tergolong Modern tersebut adalah Pesantren Darussalam, Gontor Ponorogo, Pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Timur; Pesantren Darun Najah Jakarta Selatan, Darul Qalam, Balaraja Tangerang Banten, Pesantren/Mahad al Zaitun, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Yang disebut terakhir ini memiliki lahan kampusnya

Kedua, dengan mempertahankan keunggulan yang terdapat di dalam pendidikan Pesantren. Harus diakui bahwa di samping berbagai kelemahan atau kecurangan sebagaimana tersebut di atas, pendidikan pesantren masih memiliki kekuatan dan keunggulan yang tidak dijumpai lembaga pendidikan lainnya. Pesantren dengan sistem dan karakternya tersendiri telah menjadi bagian integral dari suatu institusi sosial masyarakat, khususnya pedesaan. Meski mengalami pasang surut dalam mempertahankan misi dan eksistensinya, namun sampai kini pesantren tetap survive. Bahkan beberapa di antaranya muncul sebagai model gerakan alternatif bagi pemecahan masalah-masalah sosial masyarakat desa, seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Pabelan dan juga beberapa pesan-

tren lainnya. Pada zaman revolusi fisik, pesantren merupakan salah satu pusat gerilya dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan.¹³ Banyak santri membentuk barisan *Hizbullah* yang kemudian menjadi salah satu embrio Tentara Nasional Indonesia. Keadaan ini telah membawa pesantren mampu mengemban tantangan zamannya, sehingga bobot pesantren menjadi tinggi di mata bangsa, masyarakat, keluarga dan anak muda. Pada masa itu pesantren merupakan tempat belajar yang sangat bergengsi atau idola bagi generasi muda muslim. Anak-anak dari keluarga muslim (bukan priyayi) merasa rendah jika mereka tidak dapat memasuki dunia pesantren, dan keluarga mereka sangat bangga jika mereka dapat mengirimkan anaknya ke pesantren.¹⁴

seluas 2.000 hektar; fasilitas yang dilengkapi berbagai peralatan belajar mengajar dan lainnya yang super canggih; kurikulum yang memuat pengetahuan agama, pengetahuan modern dan berbagai ketrampilan lainnya; manajemen yang modern; dan berbagai keunggulan lainnya, hingga ia tampil sebagai pesantren terbesar dan termodern di Asia Tenggara, atau mungkin juga di dunia. Lihat Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. 1, hal. 476.

¹³K.H. Hasyim Asyari early awareness of political matters came as a result of Muslim encounters with colonialism in Indonesia and the Middle East. The armed struggle of Indonesian Muslim against the Dutch during the second half of nineteenth century, as seen in the Minangkabau Paderi War (1821 1837), the Javanese Diponegoro War (1825 1830), and the Acehness War (1873 1904), to mention but a few, must have influenced young Hasyim who grew up in the last quarter of that century. Indeed, since their arrival in the East Indies the Dutch were challenged by Muslim opposition spearheaded by zealous, village based ulama as well as Muslim teachers. This anti Dutch movement was nourished by a desire to defend Islam and to liberate the East Indies. See, Lathiful Khuluq, *Hasyim Asyari Religious Thought and Political Activities (1871 1947)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), First Edition, page. 70

¹⁴ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, op. cit., hal. 22 23.

Selain itu, pesantren juga memiliki kekuatan dalam melahirkan lulusan yang ahli dan mendalam ilmu agama Islamnya yang selanjutnya disebut ulama. Mereka demikian ahli dalam membahas, mengupas dan memahami kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab.

Pesantren juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang kental dengan pengalaman tradisi keagamaan, seperti dalam mengerjakan shalat wajib berjamaah, shalat sunnah, berpuasa Senin Kamis, menerapkan pola hidup sederhana (*zuhud*), kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, kemandirian, keakraban antara santri dan kiai dan antara santri dengan santri lainnya, tolong menolong. Tradisi inilah yang selanjutnya menjadi mental santri. Dalam pemahaman sehari-hari, seseorang yang berjiwa santri adalah mereka yang mengamalkan tradisi santri tersebut.¹⁵

Kekuatan lainnya yang dimiliki dunia pesantren adalah berkaitan dengan apa yang disebut sebagai *cultural resistance*. Memperhatikan budaya dan tetap bersandar pada

ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Karena konsepsi *cultural resistance* ini pula yang menyebabkan dunia pesantren selalu tegar menghadapi hegemoni dari luar. Sejarah menunjukkan bahwa saat penjajahan semakin menindas, saat itu pula perlawanan kaum santri semakin keras. *Cultural resistance* ini selalu dihubungkan dengan kekayaan mereka yang berupa kesinambungan ideologis dan historis serta mempertahankan budaya lokal. Dominasi keagamaan dunia pesantren yang *Syafi'i Asyari Ghazalian Oriented* terbukti sangat mendukung terhadap pengembangan dan pelaksanaan konsep *cultural resistance*. Tradisi ini sangat diperlukan sebagai benteng yang mampu menjaga dunia pesantren dari pengaruh budaya global yang hedonistik, materialistik, bahkan ateistik.

Selain itu pesantren juga memiliki budaya keilmuan yang tinggi. Dunia pesantren senantiasa identik dengan dunia ilmu. Definisi pesantren itu sendiri selalu mengacu

¹⁵Tradisi kehidupan di Pesantren selanjutnya telah menjadi semacam modeling yang diidentikan sebagai *uswatun hasanah* atau *sunnah hasanah* yakni contoh yang ideal (secara moral) yang selayaknya atau seharusnya diikuti oleh komunitas ini. Tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam, modeling dalam dunia pesantren agaknya lebih diartikan sebagai tasyabuh, yakni mengikuti seorang tokoh pemimpin. Walisongo yang menjadi kiblat kaum santri tentu berkiblat pada guru besar dan pemimpin Muslim, Nabi Muhammad SAW. Kekuatan modeling didukung dan sejalan dengan value system Jawa yang mementingkan paternalism dan patron client relation yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Jawa. Lihat Abdurrahman Mas'ud, Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Isma'il SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), cet. 1. hal. 26-27

kepada proses pembelajaran dengan komponen-komponen pendidikan yang mencakup pendidik, santri, serta fasilitas tempat belajar mengajar. Jika pada zaman keemasan Islam tradisi *al riblah fi thalab al ilmu* (pedalanan, pengembaraan dan perantauan untuk menuntut ilmu) demikian luar biasa, sebagaimana tercermin dalam perjalanan Imam Bukhari. Sejarah telah membuktikan bahwa tradisi yang sama juga berkembang sepanjang masa dalam masyarakat santri hingga dikenal istilah *wandering santris* atau santri-santri kelana. Tradisi *rihlah* ini pula yang telah mengantarkan dua tokoh utama pesantren: Al Bantani dan Al Tirmasi mengembara sepanjang hidupnya dan menjadi guru besar di Mekkah dan Madinah. Fenomena dua master intelektual dunia pesantren ini membuktikan bahwa ilmu agama tidak hanya milik dunia Timur Tengah, dan bahwa ilmuwan berlatar belakang sosio kultural pesantren mampu menandingi ulama-ulama manca negara baik dalam kegiatan tulis menulis berbahasa Arab maupun dalam kegiatan akademik pengajaran di pusat dunia Islam.¹⁶

Berbagai kekuatan, keunggulan dan keunikan tradisi pesantren yang demikian itu tetap perlu dipertahankan, terutama dalam melakukan penetrasi terhadap berbagai pengaruh negatif yang terjadi di era global saat ini. Kemerosotan moral kaum remaja sebagaimana terlihat pada pola hidup serba boleh (*permissif*), pergaulan bebas, berfoya-foya, santai, mengkonsumsi narkoba dan berbagai perbuatan yang merusak masa depannya sebagaimana dijumpai di kota-kota besar, bahkan juga sudah merembes ke pedesaan, menyebabkan masyarakat melirik kembali dunia pesantren. Mereka masih demikian menaruh kepercayaan yang kuat, bahwa pesantren dengan *cultural resistensi* nya itu mampu menjadi salah satu alternatif yang dapat menyelamatkan masa depan generasi muda, dari kemerosotan moral.

Ketiga, dengan memadukan kekuatan yang ada dan menerima perubahan yang datang kemudian. Di kalangan dunia pesantren terdapat suatu kaidah yang biasa mereka gunakan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Kaedah tersebut berbunyi: *al muhafadzah ala al qadim al shalih wa*

¹⁶ Lihat Abdurrahman Mas'ud, *Sejarah dan Budaya Pesantren dalam Ismail SM*, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, op. cit, hal. 32-33; Lihat pula Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Asia Tenggara...* op cit, hal. 346-416

al akhzu bi al jadid al ashlah (memelihara tradisi lama yang masih relevant dan menerima tradisi baru yang lebih relevan). Implementasi penerapan kaidah ini mengharuskan dunia pesantren bersikap terbuka untuk menerima perubahan yang ada, dan dalam waktu yang bersamaan mampu memilah dan memilih tentang bagian mana saja yang tetap harus dipertahankan dari apa yang terdapat di dunia pesantren, dan bagian mana saja yang dibawa oleh modernisasi yang dapat diterima. Dalam kaitan ini, berbagai pemikiran tentang modernisasi pendidikan perlu dipertimbangkan. Berbagai aspek yang terdapat di dunia pesantren seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, guru, manajemen, sarana prasarana, lingkungan, evaluasi dan berbagai aspek lainnya yang terdapat di dunia pesantren perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk ini perlu ada sebuah tim yang secara khusus digunakan untuk merancang dan mendesain model pembaharuan sistem pendidikan pesantren secara khusus yang diberikan fasilitas, dana dan lainnya untuk melakukan tugasnya ini. Rancangan desain model pembaharuan sistem pendidikan pesantren tersebut selanjutnya dikaji dalam sebuah workshop yang diadakan khusus untuk keperluan tersebut.

Visi, misi dan tujuan pendidikan pesantren yang seharusnya dirumuskan adalah selain menghasilkan lulusan yang ahli ilmu agama, berakhlak mulia, juga menguasai bidang keahlian tertentu yang dapat menolong masa depan hidupnya. Hal ini perlu dicatat, karena salah satu tugas pendidikan adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk masa depan yang keadaannya berbeda dengan masa lalu dan masa sekarang. Jika visi ini telah disepakati, maka berbagai komponen pendidikan lainnya seperti kurikulum, proses belajar mengajar dan sebagainya dengan sendirinya harus menyesuaikan diri. Kurikulum yang dirancang harus diarahkan pada upaya memberikan bekal pengetahuan yang seimbang antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum termasuk keterampilan dan seterusnya. Kurikulum yang dirancang tidak semata-mata diarahkan agar para siswa menguasai teori (*to know*), melainkan juga dapat mempraktekannya (*to do*), mengamalkannya (*to be*), dan mengabdikannya bagi kepentingan masyarakat (*to life together*).

Seiring dengan itu perlu dilakukan perubahan dan pengembangan terhadap metode pembelajaran yang bertumpu pada upaya (1) Mengubah cara belajar dari model konvensional menjadi cara belajar pemecahan masalah; (2) dari hafalan ke dialog;

(3) dari pasif ke kreatif; (4) dari memiliki ke menjadi; (5) dari mekanis ke inovatif; (6) dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat; (7) dari memandangi dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan, menjadi memandangi dan menerima ilmu dalam dimensi proses; dan (8) melihat fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, tetapi mengolah dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan. Oleh karena itu, keteladanan, asrama, dan kelompok-kelompok kecil merupakan cara-cara yang amat baik dalam menumbuhkembangkan budi pekerti luhur, kesetiakawanan sosial, disiplin, dan etos kerja.¹⁷

Guna mendukung terlaksananya visi, misi, tujuan dan proses pembelajaran yang demikian itu diperlukan adanya seorang guru atau kiai yang tidak hanya mendalam ilmu agamanya, melainkan juga memiliki keterampilan mengajar (*teaching skill*) yang handal. Jika kita sepakat, bahwa demi keselamatan bangsa Indonesia di masa depan dengan cara menghasilkan lulusan pendidikan pesantren yang lebih kreatif, inovatif dan lebih ulet dari

pada generasi-generasi yang ada selama ini, maka konsekwensinya ialah bahwa seluruh kegiatan pendidikan yang kita selenggarakan harus merangsang, tidak menghambat tumbuhnya kreatifitas, motivasi dan sikap ulet ini. Harapan ini akan dapat terwujud apabila dunia pendidikan pesantren memiliki guru yang menghargai prakarsa murid. Jangan terlampau cepat memberikan predikat *lancang* kepada murid yang memulai sesuatu yang baru. Untuk memupuk sifat ulet, guru harus siap mendampingi murid dalam usahanya menjalani berbagai proses belajar. Membesarkan hatinya pada waktu murid tampak hampir putus asa, pada waktu murid tampak akan menjadi sombong karena kehebatan prestasi yang dicapainya; dan bukan menantanginya. Sikap mengajar yang humanis ini adalah sikap mengajar yang ditujukan bukan untuk pamer kepintaran, bukan pula untuk pamer pengetahuan dan kekuasaan. Mengajar adalah berbagi ketahuan dan berbagi ketidaktahuan. Untuk itu tidak perlu takut mengatakan tidak tahu kepada murid.¹⁸ Untuk menghasilkan guru yang mendalam ilmunya, memiliki teknik mengajar

¹⁷ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II, hal. 49

¹⁸ Mochtar Buchori, *Ilmu Pendidikan & Praktik Pendidikan dalam Renungan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994), cet. 1, hal. 43-44

yang memadai dan berjiwa humanis tersebut, maka kepada setiap guru/ustadz yang mengajar/mendidik di pondok pesantren perlu diberikan pelatihan tentang ilmu dan praktek keguruan yang memadai. Ilmu didaktik, metodik, pedagogik, perencanaan, dan disain pembelajaran, metode pembelajaran, teknik motivasi, penguasaan kelas, teknik evaluasi, dan sebagainya perlu diberikan kepada para guru/ustadz yang mengajar di pondok pesantren.

Keempat, dengan memberikan bekal keterampilan bekerja produktif. Di atas telah disebutkan bahwa sehubungan dengan tantangan zaman, telah terjadi perubahan pada program pendidikan yang terdapat di pondok pesantren. Di antara perubahan tersebut adalah sudah banyak pondok pesantren yang melengkapi dirinya dengan pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Umum, Sekolah Kejuruan dan sebagainya. Namun ada pula pondok pesantren yang masih bertahan dengan mengajarkan ilmu agama saja, mengingat tidak adanya kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut. Pesantren jenis terakhir atau tradisional ini perlu tetap dipertahankan, mengingat masih banyak masyarakat di pedesaan yang kurang mampu yang membutuhkan layanan pendidikan yang murah. Masyarakat

pedesaan yang kurang mampu tidak akan sanggup memasukkan putera puterinya ke pesantren modern yang umumnya membutuhkan biaya yang tinggi. Kehadiran pondok pesantren yang tradisional tersebut nyaris tidak terimbas oleh krisis ekonomi, karena dalam kehidupan kesehariannya mereka sudah terbiasa dengan hidup susah dan kesusahan tersebut bagi mereka bukan merupakan beban, melainkan sesuatu yang harus dijalani oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi mereka adalah merupakan jihad. Namun karena ilmu yang mereka pelajari terbatas pada masalah masalah agama saja, maka ruang gerak pekerjaan para lulusannya juga amat terbatas. Mereka nyaris tidak bisa memasuki lapangan kerja yang membutuhkan penguasaan ilmu dan keterampilan modern. Mereka hanya dapat bekerja pada sektor informal, seperti menjadi guru ngaji di rumah-rumah di mesjid, mushala, dan madrasah, menjadi tukang baca do'a atau imam di mushalla, mengurus jenazah dan berbagai kegiatan keagamaan bagi masyarakat pedesaan atau kelas sosial menengah ke bawah. Pekerjaan semacam ini tetap diperlukan, bahkan mutlak adanya, karena masyarakat juga banyak yang membutuhkan. Namun dalam konteks perubahan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, jumlah pesantren

yang bercorak tradisional ini tidak perlu terlalu banyak. Selain itu kepada para lulusan pesantren tradisional ini perlu diberikan keterampilan kerja praktek yang dapat menjadi sumber pendapatan ekonominya kelak, seperti praktek jahit menjahit, menyablon, membuat batako, menjadi tukang kayu, menjadi tukang cukur, mengesol sepatu, membuat tahu tempe, menanam sayur mayur, beternak ayam dan sebagainya. Metodenya tidak mesti dengan menyediakan berbagai sarana yang diperlukan untuk itu, melainkan dapat bekerja sama dengan masyarakat para pengrajin atau pengusaha yang ada di sekitar pesantren.

Pesantren-pesantren yang lainnya perlu diperbaharui program pendidikannya sehingga selain mampu menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang lebih luas, juga dapat melanjutkan pendidikan para lulusannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kelima, dengan melakukan peran sebagai pusat pembaharuan pemikiran. Berbagai kajian yang dilakukan para santri terhadap ilmu-ilmu agama melalui berbagai kitab klasik yang berbahasa Arab adalah merupakan tradisi yang perlu terus dipelihara. Namun kajian tersebut di masa yang akan datang harus dikaitkan dengan dua hal. *Pertama*,

harus dikaitkan dengan semangat yang terdapat di dalam al Qur'an dan al Sunnah, serta semangat perubahan zaman. Hal ini penting dilakukan, agar para santri yang mempelajari kitab tersebut tidak terjebak kepada sikap yang menganggap bahwa apa yang dipelajarinya itu sebagai sesuatu yang benar-benar telah sesuai dengan al Qur'an dan al Sunnah serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Semangat mendalami kajian kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab itu harus disertai dengan sikap kritis dan inovatif. Kita misalnya dapat memberikan contoh beberapa pandangan yang selama ini dikaji di pesantren sebagai yang tidak sesuai dengan ajaran al Qur'an dan al Sunnah. Di dalam kitab fikih yang dikaji para santri di pesantren misalnya dikatakan, bahwa shalat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat yang ditentukan (*aqwalun wa afalun mustatabatun bi al takbir wa mukhtamatun bi al taslim bi syaraitha makhsusatin*). Definisi shalat seperti ini tidak salah, melainkan terlalu bersifat teknis, dan belum menulik kepada hakikat shalat itu sendiri sebagai sarana untuk mencapai hubungan yang intens dan disadari dengan Tuhan sebagai makna dari kata shalat yang berasal dari *washala* yang berarti komunikasi secara ruhaniah dan

bathiniah. Selanjutnya karena pengertian shalat yang selama ini terlampaui mekanistik dan teknis itulah, maka shalat yang dikerjakan masyarakat saat ini hanya berhenti pada segi-segi teknis formalistik, tanpa menghasilkan pencerahan spiritual. Harapan Tuhan agar shalat yang dikerjakan umat manusia agar dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar menjadi tidak tercapai.¹⁹ Terjadinya kesenjangan antara praktek shalat dengan terjadinya kemerosotan moral, antara lain disebabkan pemahaman terhadap shalat yang terlampaui mekanistik dan teknis tersebut dan belum berada dalam semangat al Qur'an sebagaimana tersebut di atas. Dalam kaitan ini, dunia pesantren harus ikut bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Demikian pula kita menjumpai pemahaman tentang ulama yang selama ini dianut dan dipahami oleh kalangan dunia pesantren sebagai yang tidak sesuai dengan semangat al Qur'an. Ulama sering diartikan sebagai orang yang mendalami ilmu agama Islam lengkap dengan keteladanan akhlakunya. Pengertian

ini tidak salah, namun belum lengkap. Yang lebih kurang lengkap lagi, jika yang disebut ulama itu hanya yang mendalami ilmu fikih yang sesuai dengan madzhabnya saja. Pengertian ulama yang demikian itu tidak sejalan dengan semangat al Quran yang menganut paham ilmu yang holistik dan integratif, bukan ilmu yang parsial dan dikhotomis. Berdasarkan isyarat yang terdapat dalam surat *Fathir* ayat 27-28 terdapat petunjuk yang jelas, bahwa seorang ulama adalah para peneliti terhadap *ayat ayat kauniyah*, seperti ayat yang berkenaan dengan proses turunnya hujan yang menghasilkan Ilmu meteriologi dan geofisika, proses pertumbuhan dan perkembangan berbagai tanaman yang menghasilkan ilmu pertanian, proses pergeseran lempengan lapisan bumi yang menghasilkan ilmu geologi, proses perkembangbiakkan hewan ternak yang menghasilkan ilmu biologi. Penelitian tersebut selanjutnya mengantarkan jiwanya untuk mengagumi keagungan Tuhan, dan dengan penuh kesadaran nuraninya, Ia tunduk, patuh dan takut melanggar aturan-aturan Nya. Inilah sosok

¹⁹Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang shalat dalam hubungannya dengan pencerahan spiritual yang menghasilkan manusia-manusia yang bermoral. Misalnya ayat yang artinya: Sesungguhnya shalat (yang kamu kerjakan itu) memiliki kemampuan untuk mencegah kamu dari perbuatan yang keji dan munkar. (Q.S. *al Ankabut*, 29:45); Wahai Anaku dirikanlah shalat dan perintahkan orang lain berbuat baik dan melarang dari kemunkaran (Q.S. *Luqman*, 31:17).

ulama yang diajarkan di dalam al Qur'an. Pengertian ulama dalam arti sebagai orang yang mendalami masalah-masalah agama juga disebutkan di dalam al Quran, yaitu ayat yang artinya: *Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya? (Q.S. Asy Syuara, 26:197)*. Ayat ini memberi isyarat bahwa sebutan ulama sebagai ahli agama adalah dalam hubungannya dengan Bani Israil.

Contoh contoh terjadinya deviasi pemahaman keagamaan sebagaimana tersebut di atas masih banyak dijumpai di pesantren. Deviasi ini harus segera diatasi karena dampaknya cukup signifikan terhadap pembentukan pemahaman keagamaan yang sesuai dengan al Qur'an dan al-Sunnah, dan yang sesuai dengan al Qur'an dan al Sunnah ini dijamin pasti sesuai dengan tantangan zaman.

Dalam situasi perubahan sosial ekonomi sebagaimana tersebut di atas, pesantren harus tampil mengawal masyarakat agar hidup sesuai dengan semangat al Quran²⁰ dan al sunnah yang diyakini sesuai dengan perkembangan zaman.

Berbagai perkembangan baru yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya seringkali menimbulkan berbagai pertanyaan baru yang belum dijumpai rujukannya di dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama klasik di masa lalu, mengingat zamannya berbeda dengan zaman yang ada sekarang. Demikian pula perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam (sains), maupun ilmu pengetahuan sosial telah menghasilkan berbagai teori yang luar biasa banyaknya. Berbagai teori tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketika mereka harus mengamalkan ajaran al Qur'an dan al Sunnah, berbagai teori yang mereka pahami itu akan mempengaruhinya. Mereka akan ingin tahu apakah teori yang mereka pahami itu ada rujukannya di dalam al Qur'an dan al Sunnah. Pertanyaan mereka itu perlu dilayani dan dijawab oleh para ulama dari pesantren. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut kalangan ulama pesantren diyakini akan mengalami kesulitan atau kegagalan, karena keulamaan yang disandangnya

²⁰ Among spiritual, text the uniqueness of the Quran stands in its claim that it being the direct product of divine wisdom, its contents are beyond any doubt or error. This make the Quran all the more attractive as not only its message but also its words, its entire text and even the order of arrangement are believed to divinely ordained and not an iota of human ingenuity has crept into it. See Mohd. Zaki Kirmani, *The Quran and Future of Scince*, (India: Global Vision Publishing House, 2001), First Edition, hal.xii

hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja. Mereka belum terbiasa dan belum mengenal ilmu pengetahuan modern yang demikian luas itu. Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka tidak mengherankan jika kemudian masyarakat mencari jawaban dari tempat lain. Sementara itu para ulama akan kehilangan peluangnya untuk mengakses berbagai hal yang terdapat di masyarakat. Keadaan ini tidak boleh terjadi. Dunia pesantren harus melihat kembali kepada peran sosiologis, peran kultural, peran politis, peran ideologis, peran agamis, dan peran-peran lainnya yang pernah dilakukannya di masa lalu. Dalam situasi yang ditandai oleh perubahan sosial ekonomi masyarakat, peran-peran strategis yang dimiliki dunia pesantren ini nyaris semakin jauh diraih oleh dunia pesantren. Kini saatnya dunia pesantren bangkit melakukan perubahan terhadap sistem pendidikannya seiring dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari segi pertumbuhan dan perkembangannya, kehadiran pesantren adalah merupakan refleksi dari tanggung

jawab umat Islam terhadap ajaran agama yang dianutnya, yakni kewajiban menyebarkan ilmu pengetahuan serta melakukan tugas-tugas kemanusiaan sebagai bagian dari tugas *amar maruf nahi munkar*. Karena itu pesantren lebih merefleksikan model pendidikan yang khas Indonesia. Berbagai teori yang mengatakan bahwa asal usul pesantren sebagai yang dipengaruhi oleh faktor dari luar tidak perlu diperdebatkan, karena dengan wataknya yang terbuka dan missinya membawa rahmat bagi seluruh alam, sejak dari zaman dahulu, Islam dengan perangkat pendidikannya (pesantren) telah tampil sebagai institusi yang bersifat terbuka terhadap pengaruh dari manapun datangnya, dengan menyaring, memilah dan memilihnya secara selektif

Kedua, sejalan dengan latar belakang kelahirannya itu, pesantren di Indonesia sudah terbiasa memberikan responsi dan terlibat dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Pesantren selain berperan sebagai *cultural broker* (melalui figur kiainya), juga telah berperan dalam melakukan transformasi sosial, politik, ideologi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Peran yang dilakukan pesantren yang demikian itu telah banyak menarik perhatian masyarakat internasional.

Ketiga, dihubungkan dengan adanya perubahan situasi sosial ekonomi sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era global seperti yang terjadi saat ini, peran dan tanggung jawab pesantren sebagaimana yang pernah dilakukannya di masa lalu, kembali dipersoalkan, mengingat berbagai aspek yang selama ini diterapkan di dunia pesantren ternyata sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan era global sebagaimana tersebut di atas. Berbagai kajian terhadap visi, misi, tujuan, lingkungan, kurikulum, pelajar, alumni, pola manajemen, kepemimpinan serta lainnya yang terdapat di dunia pesantren telah banyak dikaji para ahli. Hasilnya adalah bahwa semua aspek tersebut sudah waktunya, untuk diperbaharui, dengan tetap mempertahankan berbagai kekuatan yang menjadi ciri khas dunia pesantren tersebut.

Keempat, dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi yang terjadi di era global saat ini, menunjukkan bahwa dunia pesantren ternyata telah meresponnya dengan sikap yang amat beragam. Sebagian dari pesantren, ada yang tetap berada pada ketradisionalannya, sebagian yang lain ada yang telah tampil meresponsnya dengan sangat modern, sebagaimana diperlihatkan oleh beberapa pesantren yang

tergolong besar dan maju yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kelima, perubahan sosial ekonomi yang terjadi di era global saat ini mengharuskan adanya pembaharuan terhadap sistem pendidikannya. Berbagai aspek pendidikan pesantren: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, guru, lingkungan, manajemen, evaluasi, pola komunikasi dan sebagainya harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa menghilangkan ciri khas dan jati diri pesantren tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya suatu komisi pembaharuan sistem pendidikan pesantren yang terdiri dari kalangan ulama pesantren, pakar pendidikan Islam, pakar pendidikan umum, ekonom, sosiolog, budayawan, antropolog, praktisi dan teknokrat pendidikan, dan seterusnya.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Mochtar, *Pendidikan Antisipatoris*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2004), cet. IV.
- , *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1994), cet. 1.
- Chirzin, M. Habib, (ed.), *Islamic Millenium Journal, Social Reconciliation and Gender*

- Justice*, Volume I/Number I /Sept
Nov 2001)
- Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962).
- Dzofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), cet. I.
- Hasan, Muhammad Kamal, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), cet. I.
- Helmanita, Karlina, et.al, (ed.), *Dialogue in The World Disorder*, (Jakarta: Center for Language and Cultures, 2004), First Edition.
- Hosen, Nadirsyah, *Revelation in a Modern Nation State: Muhammadiyah and Islamic Legal Reasoning in Indonesia*, dalam *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 10, (Jakarta: PPIM, Number 1, 2003).
- Ismail SM, dkk, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dengan Pustaka Pelajar Yogyakarta, 20020, cet. 1.
- Madjid, Nurcholish, *Bilik bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1977), cet. 1.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), cet. 1.
- Midgley, James, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, (terj.) Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas dari judul asli *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, (Jakarta: Ditperta Islam, 2005), cet. 1.
- Mufid, Ahmad Syafi'i, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), cet.1.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970).
- Khuluq, Latiful, *Hasyim Azyari Religious Thought and Political Activities (1871 1947)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), First Edition.
- Kinnani, Mohd. Zaki *The Quran and Future of Science*, (Delhi. Global Vision Publishing House, 2001), First Edition.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1986), cet. I.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), cet. IV.